

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa pajak daerah sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Daerah, masyarakat wajib membayar pajak tepat pada waktunya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam Penghapusan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor berupa mengeluarkan surat edaran yang dimana pada tahun 2022 Gubernur Jambi melaksanakan Penghapusan Sanksi Administrasi ini sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun, dimana mengeluarkan Surat edaran Nomor 21 KEPGUB/BAKEUDA-2-2/2022 mulai 7 Januari 2022 sampai dengan 30 April 2022 yang menggunakan program ini ada sebanyak 56,723 Unit kendaraan bermotor, Nomor 374/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2022 mulai 1 Mei 2022 sampai dengan 31 Juli 2022 yang menggunakan program ini ada sebanyak 51,491 Unit kendaraan bermotor kemudian masyarakat yang menggunakan program penghapusan sanksi administrasi sebanyak 51,491 Unit, Nomor 812/KEP.GUB/BPKPD-2.2/2022 mulai 19 September 2022 sampai dengan Desember 2022 yang menggunakan program ini ada sebanyak 95,260 Unit kendaraan bermotor.
2. Bahwa jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Jambi pada tahun 2020 ada sejumlah 2,185,414 Unit kemudian wajib pajak yang taat membayar pajak hanya 665,831 Unit sehingga persentase yang bayar hanya 30% kemudian

masyarakat yang menggunakan program penghapusan sanksi administrasi sebanyak 56,723 unit. Pada tahun 2021 ada sejumlah 2,319,596 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 676,426 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29% kemudian masyarakat yang menggunakan program penghapusan sanksi administrasi sebanyak 51,491 Unit. Pada tahun 2022 sebanyak 2,464,567 Unit kendaraan bermotor di Provinsi Jambi kemudian wajib pajak yang membayar pajak hanya 729,908 Unit sehingga persentase wajib pajak yang membayar hanya 29% kemudian masyarakat yang menggunakan kebijakan penghapusan sanksi administrasi sebanyak 95,260 unit. Dimana faktanya Penghapusan Sanksi Administrasi dapat menimbulkan kesadaran hukum masyarakat melalui kebijakan penghapusan sanksi administrasi.

2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya dapat diambil saran sebagai berikut ini:

1. Pemerintah Daerah harus bisa lebih optimal kembali dalam mensosialisasikan kepada masyarakat dalam membayar pajak tepat waktu, karena sanksi administrasi penerapannya akan lebih efektif jika dilakukan penyuluhan kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi sadar pajak karena mengerti fungsi pajak dalam masyarakat dan apa guna pajak bagi diri pribadi wajib pajak. Sebab kebijakan Penghapusan Sanksi Administrasi pajak kendaraan bermotor ini penting bukan hanya dilihat dari segi ekonominya saja melainkan dari segi ketaatan hukum masyarakat juga perlu.

2. Saran kepada masyarakat agar mempunyai kesadaran penuh akan kewajiban membayar pajak dan dapat memenuhi kewajiban pajak. Karena tidak ada pilihan selain harus dipatuhi, sanksi yang diberikan merupakan alat utama untuk memaksa seseorang untuk mematuhi ketentuan atau peraturan yang berlaku.